Wetlands INTERNATIONAL

Warta Konservasi Lahan Basah

Vol 25 No.3, September 2017



- **Batu Lima, Kawasan Wisata Terbengkalai**
  di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan
- Kemampuan Pengeringan (*Drainability*) **Kelayakan Budidaya di Lahan Gambut**
- **Peraturan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional**
  Akhirnya Diterbitkan
- **Mengenang H. Madsahi**
  Sosok Pejuang Lingkungan yang tidak pernah Mengenal Lelah

Dari Redaksi

Salam redaksi,

Sangat menyedihkan bagi kita melihat ekosistem lahan basah yang seharusnya kuat, indah dan lestari, mengalami degradasi dan kerusakan. Seperti yang terjadi di kawasan wisata pesisir Batu Lima di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, keindahan dan kebersihannya sudah tidak nampak lagi. Sedimen lumpur dan sampah-sampah yang dibawa dari hulu (terutama akibat penambangan batu bara dan alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian), merupakan penyebab utama rusaknya kawasan wisata Batu Lima.

Di sisi lainnya, ekosistem gambutpun sering mengalami gangguan dan kerusakan yang sama, terutama diakibatkan oleh adanya pembukaan hutan/lahan gambut, serta drainase yang berlebihan, sehingga menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca.

Simak informasi selengkapnya, dan juga berita-berita lain seputar perlahanbasahan Indonesia.

Selamat membaca.

Daftar Isi

Fokus Lahan Basah

Batu Lima, Kawasan Wisata Terbengkalai di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 3

Konservasi Lahan Basah

Emisi Gas Rumah Kaca dan Karbon di Lahan Gambut: Potensi Pelepasan dan Penyerapan 4

Berita Lahan Basah

Peraturan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional Akhirnya Diterbitkan 6

H. Madsahi, Sosok Pejuang Lingkungan yang tidak pernah Mengenal Lelah 8

Lokakarya Pemetaan Kesempatan dan Rencana Rehabilitasi Mangrove di Kabupaten Demak 10

Lokakarya Penyusunan Grand Design Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta 2017-2030 12

Peduli Ekosistem Mangrove, Bersih-bersih Sampah di Segara Anakan Cilacap 14

Penilaian Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional menggunakan Perangkat METT 15

Dokumentasi Perpustakaan 19

Mengenal Jenis

Berang-berang (Otter) 19

DEWAN REDAKSI:

Pimpinan Redaksi:
Direktur
Wetlands International Indonesia

Anggota Redaksi:
Triana
Ragil Satriyo Gumilang

"Artikel yang ditulis oleh para penulis, sepenuhnya merupakan opini yang bersangkutan dan Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isinya"

Wetlands INTERNATIONAL

Ditjen. KSDAE,
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

UCAPAN
TERIMA KASIH DAN UNDANGAN

Kami haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada seluruh penulis yang telah secara sukarela berbagi pengetahuan dan pengalaman berharganya untuk dimuat pada majalah ini.

Kami juga mengundang pihak-pihak lain atau siapapun yang berminat untuk menyumbangkan bahan-bahan berupa artikel, hasil pengamatan, kliping, gambar dan foto, untuk dimuat pada majalah ini. Tulisan diharapkan sudah dalam bentuk soft copy, diketik dengan huruf Arial 10 spasi 1,5 maksimal 4 halaman A4 (sudah berikut foto-foto).

Semua bahan-bahan tersebut termasuk kritik/saran dapat dikirimkan kepada:

Triana - Divisi Publikasi dan Informasi
Wetlands International Indonesia
Jl. Bango No. 11 Bogor 16161
tel: (0251) 8312189
fax./tel.: (0251) 8325755
e-mail: publication@wetlands.or.id

Batu Lima, Kawasan Wisata Terbengkalai

di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan

*Mochamad Arief Soendjoto**

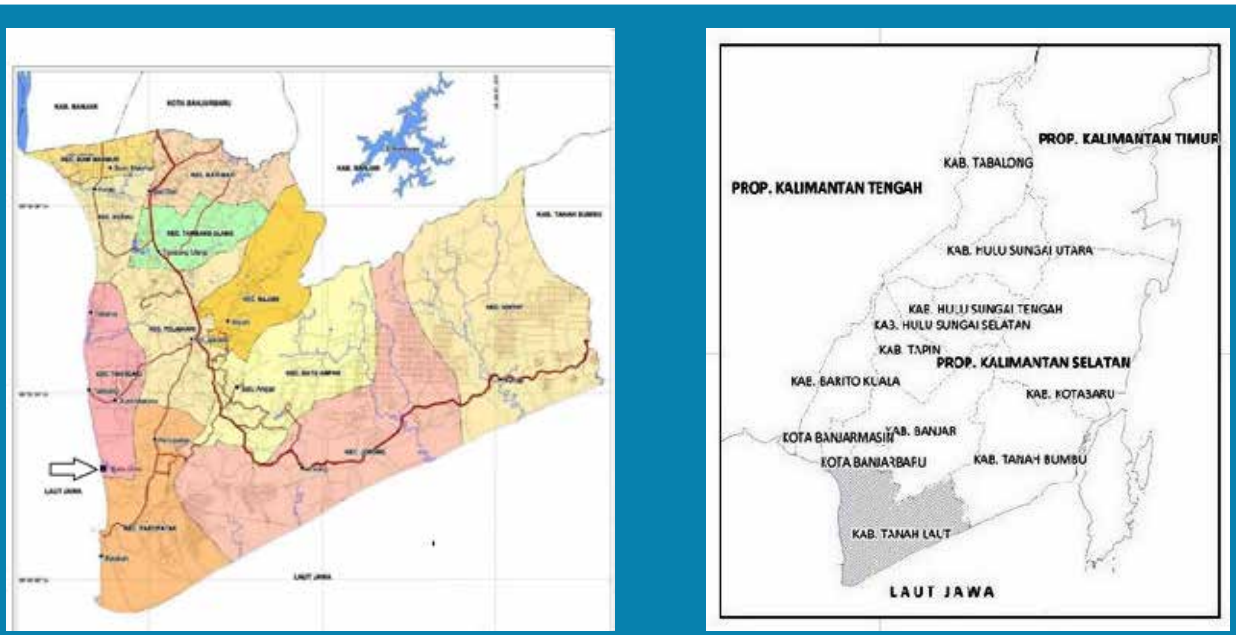
Tanah Laut adalah satu dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, provinsi terkecil di Pulau Kalimantan. Kabupaten seluas 363.135 hektar ini terletak di bagian selatan wilayah provinsi. Wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru di utara, Laut Jawa di selatan dan barat, serta Kabupaten Tanah Bumbu di timur. Pada pesisir yang berbatasan dengan Laut Jawa inilah terdapat beberapa kawasan wisata pantai yang salah satunya adalah Batu Lima.

Batu Lima terletak di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung. Jaraknya dari Banjarmasin, ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, sekitar 80 km dan dari Pelaihari, ibukota Kabupaten Tanah Laut, sekitar 35 km. Batu Lima dapat ditempuh dari (1) Banjarmasin melalui Kecamatan Gambut (Kabupaten Banjar) dan Kecamatan Kurau (Kabupaten Tanah Laut), (2) Banjarmasin melalui Pulau Sari dan Kecamatan Kurau (Kabupaten Tanah Laut), atau (3) Banjarmasin melalui Pelaihari dan Kecamatan Gunung Makmur (Kabupaten Tanah Laut).

Batu Lima diapit oleh dua kawasan wisata pantai (Gambar 1). Pada jarak ± 14 km ke utara terdapat Pantai Takisung dan pada jarak ± 16 km ke selatan terdapat Pantai Batakan. Pantai Takisung berada di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Batu Lima pun demikian. Pada sisi lain, Pantai Batakan merupakan bagian dari kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pelaihari Tanah Laut. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan konservasi di Kalimantan Selatan dan pengelolaannya di bawah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Banjarbaru.

Daya tarik Batu Lima adalah hamparan pasir pantai dan air laut yang bersih (tanpa sampah). Daya tarik demikian sebenarnya (dapat dikatakan) jamak untuk semua kawasan wisata pantai, seperti yang ada di Pantai Takisung, Pantai Batakan, dan pantai-pantai lainnya di Kabupaten Tanah Laut yang diorbitkan belakangan.

.....bersambung ke hal 16



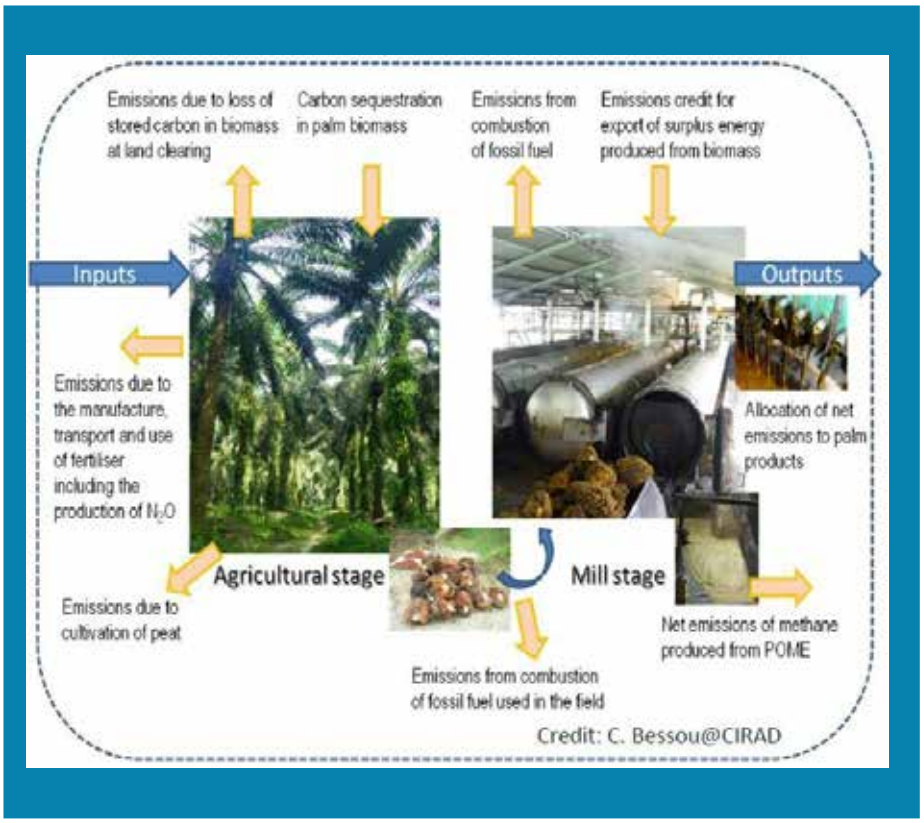
Gambar 1. Batu Lima, kawasan pantai di barat wilayah Kabupaten Tanah Laut

Serial Informasi Gambut

Emisi Gas Rumah Kaca dan Karbon di Lahan Gambut
Potensi Pelepasan dan Penyerapan*

Seri 3

Emisi CO_2, CH_4 dan N_2O



Nitrogen Dioksida (N_2O) terutama dipancarkan sebagai hasil sampingan dari proses nitrifikasi dan denitrifikasi. Di bidang pertanian, penggunaan pupuk nitrogen (anorganik dan organik) merupakan penyebab utama pelepasan N_2O ke atmosfer.

Pemupukan N pada gambut perlu diatur dengan baik dan diperlukan rencana pengelolaan pupuk yang baik untuk meminimalkan emisi.

Keseimbangan karbon pada ekosistem gambut tropis adalah hasil serapan karbon dioksida (CO_2) melalui fotosintesis dan dilepaskan dengan respirasi. Komponen respirasi terdiri dari respirasi heterotrofik (penguraian gambut oleh mikroba) dan respirasi autotrofik (respirasi dari akar tanaman).

Drainase tanah gambut menyebabkan karbon dioksidasi dan dilepaskan sebagai CO_2 ke atmosfir. Pelepasan CO_2 tergantung permukaan air: permukaan air yang lebih tinggi berarti lebih sedikit emisi CO_2. Secara umum, masing-masing 1 cm drainase menyebabkan emisi CO_2 0,9 ton per hektar tanah gambut per tahun. Emisi CO_2 gambut adalah proses yang kontinyu dan berhenti saat tanah gambut diairi kembali (*rewetting*).

Metana (CH_4) terbentuk di bawah kondisi anaerobik (kekurangan oksigen). Di sektor kelapa sawit, dalam pengolahan buah tandan konvensional, produk sampingan POME adalah sumber CH_4 terbesar di pabrik pengolahan. Praktik penangkapan metana sangat penting untuk mengurangi emisi. Lahan dengan pembukaan kanal drainase merupakan sumber terbesar CH_4.

Stok karbon bawah permukaan

Pada lahan gambut, karbon disimpan dalam bentuk biomassa bawah permukaan (akar) dan tanah gambut.

Jumlah stok karbon tanah gambut dihitung dari:

1. Kepadatan isi
2. Kandungan karbon organik
3. Kedalaman atau ketebalan gambut
4. Luas areal gambut

Sumber emisi terbesar di lahan gambut berasal dari oksidasi gambut karena drainase dan dari pembukaan hutan rawa gambut.

Langkah nyata yang paling baik untuk mengurangi atau mencegah emisi di lahan gambut adalah dengan melindungi, memelihara dan meningkatkan fungsi hutan rawa/lahan gambut.

Negara	Areal Gambut (ha)	Rata-rata Ketebalan Gambut (m)	Volume (m^3*10^6)
Indonesia	20.695.000	5.5	1.138.225
Brunei	90.900	7	6.363
Malaysia	2.588.900	7	181.223
Myanmar (Burma)	122.800	1.5	1.842
Papua New Guinea	1.098.600	2.5	27.465
Philipina	64.500	5.3	3.418,5
Thailand	63.800	1	638
Vietnam	53.300	0.5	266.5

Perkiraan terbaik lahan gambut (ha), tebal rata-rata (m) dan volume (m^3) gambut di Asia Tenggara tropis. Kandungan C dari gambut tropis berkisar antara 40-60%.

Stok karbon atas permukaan



Sekitar 50% biomassa di atas tanah adalah karbon, dan biomassa kayu dapat menyerap ratusan ton/ ha

Setelah pembersihan vegetasi untuk konversi ke perkebunan, C terlepas ke atmosfer dari biomassa yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan potongan-potongan kayu. Total emisi C adalah sejumlah hilangnya biomassa terkait dari ketiga unsur tersebut. Untuk kesederhanaan hitungan, emisi seringkali diasumsikan terjadi pada saat pembersihan saja, namun kenyataannya pelepasan C terjadi selama bertahun-tahun.

**(Sumber: Roundtable on Sustainable Palm Oil dan Wetlands International)*

Peraturan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional
Akhirnya Diterbitkan

Susan Lusiana

Setelah melalui proses penyusunan yang berlarut-larut, akhirnya Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional diterbitkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian (Permenko) No.4/2017, pada 22 Agustus 2017 lalu. Peraturan ini diterbitkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelolaan ekosistem mangrove nasional dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

Penyusunan naskah ini telah berlangsung sejak disahkannya PP 73/2012, 5 tahun silam. Menteri Koordinator Perekonomian yang ditunjuk selaku ketua pengarah Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove memastikan bahwa dokumen ini menjadi pedoman dan acuan bagi pihak terkait, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak terkait lainya untuk melakukan pengelolaan ekosistem mangrove. Di dalam peraturan ini ditegaskan bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Kebijakan, Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Ekosistem Mangrove Nasional masing-masing kementerian/ lembaga, harus menetapkan kegiatan/rencana aksi paling lama 2 (dua) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini mencakup lokasi, target kuantitatif, dan waktu (tahun dan durasi).

Permenko ini mengatur berbagai sasaran, strategi, program, dan kegiatan pada empat nilai penting pengelolaan ekosistem mangrove yaitu ekologi, sosial ekonomi, kelembagaan dan perundang-undangan. Selain itu juga menjadi alat keterlibatan publik secara luas, baik untuk berpartisipasi dalam pemulihan, seperti ikut dalam pemulihan ekosistem mangrove maupun turut mengawasi apabila



ada kementerian/lembaga yang belum melaksanakan tanggung jawab sebagaimana tertuang di dalam rencana aksinya.

Di dalam Permenko ini disebutkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015 menunjukkan bahwa dari total 3.49 juta hektar ekosistem mangrove di Indonesia, sekitar 52%nya telah mengalami kerusakan akibat penebangan dan alih-fungsi lahan. Kerusakan ini bisa terus berlanjut manakala kegiatan konversi terus-menerus dilakukan. Padahal mangrove memiliki nilai penting dalam konteks ekonomi, ekologi, sosial dan budaya, serta berperan dalam pengurangan risiko bencana dan mitigasi-adaptasi perubahan iklim. Untuk itu, di dalam dokumen ini pemerintah menetapkan total luasan mangrove untuk bisa dipulihkan secara keseluruhan pada tahun 2045 mendatang

Secara garis besar, peraturan ini menetapkan hal-hal sbb:

1. Pengendalian pemanfaatan dan konversi ekosistem mangrove dengan prinsip kelestarian (*no net loss)*.

2. Peningkatan fungsi ekosistem mangrove dalam perlindungan keanekaragaman hayati, perlindungan garis pantai, dan sumberdaya pesisir, serta peningkatan produk yang dihasilkan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan masyarakat.

3. Pengelolaan ekosistem mangrove sebagai bagian integral dari pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

4. Komitmen politik dan dukungan kuat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pihak terkait lainnya.

5. Koordinasi dan kerja sama antar instansi dan para pihak terkait secara vertikal dan horizontal untuk menjamin terlaksananya Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

6. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat dengan memperhatikan nilai ekologi, ekonomi, dan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

7. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban pengelolaan ekosistem mangrove sesuai dengan kondisi dan aspirasi lokal.

8. Pengembangan riset, iptek dan sistem informasi yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan.

9. Pengelolaan ekosistem mangrove melalui pola kemitraan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dengan dukungan lembaga dan masyaraka t internasional, sebagai bagian dari upaya mewujudkan komitmen lingkungan global.

Dari hal-hal diatas, maka dapat dilihat bahwa kebijakan pengelolaan eksosistem mangrove berdasarkan peraturan ini telah mengakomodir prinsip multistakeholder, partisipatif, integratif, dan berbasiskan pada pendekatan bentang lahan. Selain itu, ekosistem mangrove juga diposisikan sebagai zona penyangga, penyedia kehidupan, peredam abrasi, dan pengendali dampak cuaca ekstrim lainnya akibat perubahan iklim. Semoga ke depannya, peraturan ini mampu mempercepat proses pemulihan ekosistem mangrove di Indonesia. ••



H. Madsahi, Sosok Pejuang Lingkungan yang tidak pernah Mengenal Lelah

Selamat jalan Bapak H. Madsahi, karya dan tetesan keringatmu akan terus kami kenang ...

Triana

Kiprah mulia pengabdian H. Madsahi terhadap pelestarian lingkungan pesisir diawali pada tahun 1979 saat menjadi tenaga penjaga sukarela di kawasan Pulau Dua. Kawasan Pulau Dua adalah surganya berbagai jenis burung-burung air, bahkan masyarakat sekitar menyebut Pulau Dua dengan Pulau Burung. Walaupun sebagai tenaga lepas kala itu, yang hanya dibutuhkan saat penjaga tidak bisa datang, tidak lantas membuat H. Madsahi asal-asalan dalam bekerja. Kegigihan dan keseriusan dalam menjaga kelestarian burung air terus beliau tunjukkan. Beberapa bulan sebagai tenaga lepas dengan kinerja yang baik, membuat bangga rekan-rekan sejawat, bahkan mereka menyarankan agar H. Madsahi mengajukan lamaran kerja secara resmi.



Nasib baik bagi H. Madsahi, lamarannya diterima dan beliau diangkat menjadi tenaga honorer. Dengan status honorer dan gaji yang diterima tidaklah besar, senantiasa disyukuri H. Madsahi, dan itu pulalah yang menjadi ciri sosok sederhana yang hanya lulusan Sekolah Dasar namun mempunyai hati mulia dan membanggakan. Pengabdiannya bagi lingkungan pesisir tidak hanya berhenti pada tugas utama yang diembannya sebagai penjaga kawasan lindung, H. Madsahi dengan ketulusannya di sela-sela waktu luang melakukan penanaman mangrove di sekitar kawasan yang dijaganya. Alhasil sepuluh tahun kemudian, jerih payah H. Madsahi mulai terlihat hasilnya, kawasan sekitar Pulau Dua mulai tampak hijau ditumbuhi mangrove. Lambat laun akar-akar mangrove mengikat sedimen dan terbentuklan daratan baru yang menghubungkan Pulau Dua dengan dengan Pulau Jawa. Manfaat lain dari tegakan mangrove baru tersebut, selain memperkuat kawasan dari terpaan gelombang dan abrasi pantai, juga menjadi habitat baru bagi burung-burung air di pulau tersebut untuk berbiak.

Ibarat kata pepatah 'nilai-nilai kebaikan yang ditanam tentu akan berbuah kebaikan pula', itu pulalah yang dirasakan oleh H. Madsahi. Pada tahun 1983, tepat empat tahun bertugas sebagai tenaga honorer, H. Madsahi mendapat penghargaan Kalpataru untuk kategori pengabdi lingkungan dari Presiden Soeharto. Apresiasi dan kebahagiaan tidak terhenti disitu, tidak berselang lama setelah menerima

penghargaan Kalpataru, H. Madsahi resmi diangkat sebagai pegawai negeri. Pada tahun 1995, H. Madsahi kembali mendapat penghargaan Satya Lencana untuk pengabdi lingkungan dari pemerintah, disusul 3 tahun kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberangkatkan H. Madsahi ke tanah suci. Hasil yang pantas diterima seorang H. Madsahi yang telah bekerja keras, tulus dan tanpa pamrih.

Berbagai pengahargaan yang diterimanya tidak lantas menjadikan H. Madsahi jumawa, kesederhanaan dan dedikasi terhadap lingkungan tidak pernah pudar. Memiliki keteguhan dan idealisme yang tinggi bagi konservasi lingkungan, kadang berdampak risiko membahayakan bagi H. Madsahi. Tidak jarang dia harus bersitegang dengan masyarakat setempat yang ingin memburu burung air dan menebang pohon mangrove di dalam kawasan. Risiko beberapa kali akan dikeroyok orang banyak pun harus beliau alami. Namun dengan keteguhannya, hal-hal membahayakan tersebut dapat dilalui. "Saya bukanlah orang pintar, namun apa yang saya lakukan ini semata-mata untuk kebaikan lingkungan sekitar termasuk bagi masyarakatnya. Jadi upaya saya memberikan pengertian dan penyadaran bagi masyarakat untuk memelihara kawasan Cagar Alam Pulau Dua mudah-mudahan dapat mereka terima", ungkap H. Madsahi.

Sekelumit kisah perjuangan seorang H. Madsahi di atas, kini tinggalah cerita. Pada pertengahan Juli 2017 lalu, kita semua disedihkan dengan kabar berpulangnya H. Madsahi ke haribaan Sang Maha Pencipta. Kita tidak akan pernah lagi melihat sosok sederhana yang selalu dihiasi senyuman, namun semangat, pembelajaran, dan karya-karya nyata H. Madsahi akan terus melekat di ingatan dan pandangan kita.

Sungguh suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami, Wetlands International Indonesia, yang telah melakukan program-programnya di pesisir Sawah Luhur, Serang (tahun 1989-sekarang), mendapat kesempatan untuk mengenal dan bekerjasama dengan H. Madsahi. Dukungan dan kerjasama erat yang beliau berikan, tidaklah lekang dalam ingatan kami. Semakin kuat dan lestarinya kawasan Cagar Alam Pulau Dua dan daerah sekitarnya saat ini, adalah juga bagian keringat dan hasil perjuangan seorang pahlawan lingkungan bernama H. Madsahi.

Selamat jalan Pak H. Madsahi, terima kasih kami untukmu atas segala perjuangan dan kebaikan yang telah kau wariskan kepada kami. Do'a kami untukmu, semoga Allah SWT mengampuni setiap kesalahan Pak Haji dan menjadikan segala amalan kebaikan Pak Haji di dunia naungan di alam akherat. Amin Ya Rabbal Alamin. ••

Foto-foto kenangan H. Madsahi



H. Madsahi saat mendapat penghargaan dan kenang-kenangan dari Direktur Program, Wetlands International Indonesia



H. Madsahi saat berfoto bersama staf WII di daratan baru hasil pemerangkap sedimen di kawasan pesisir Pulau Dua



H. Madsahi saat berfoto bersama Head of Office WII dan Direktur Bina Pengelolaan Ekosistem Esensial, KLHK

Lokakarya Pemetaan Kesempatan dan Rencana Rehabilitasi Mangrove
di Kabupaten Demak

Didik Fitrianto *

Kerusakan lingkungan di pesisir Kabupaten Demak seperti abrasi, penurunan muka tanah, hilangnya ribuan hektar tambak, banjir rob, erosi dan krisis air bersih semakin meningkat. Akibatnya kerugian ekonomi dan sosial setiap tahunnya terus meningkat, kerugian tersebut antara lain meliputi hancurnya infrastruktur publik, pemukiman penduduk, hilangnya mata pencaharian, dan konflik sosial.

Untuk menjawab permasalahan di atas konsorsium Program *Building With Nature (BWN)* menyelenggarakan Lokakarya Pemetaan Kesempatan dan Rencana Rehabilitasi Mangrove, 27-28 Juli di Hotel Amantis Demak. Kegiatan ini diikuti perwakilan kelompok dari delapan desa pesisir, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, BKSDA, BPBD, Oisca, dan LSM lokal. *Project Coordinator* dari Wetlands International Indonesia (WII) Apri Susanto Astra menyampaikan, bahwa program BwN memberikan opsi yang bisa dilakukan untuk menangani masalah lingkungan di pesisir Demak, yakni pendekatan teknis perlindungan pesisir dan pendekatan sosial ekonomi dengan strategi berbasis mangrove. "Kedua pendekatan tersebut dilakukan dengan cara membangun struktur permeabel untuk memerangkap sedimen dan mengupayakan mangrove berkoloni untuk tumbuh secara alami", lanjutnya. Sedangkan pendekatan sosial ekonomi masyarakat dilakukan dengan cara menyelenggarakan Sekolah Lapang Tambak dan pengembangan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat pesisir.

Ben Brown, nara sumber dari Yayasan Hutan Biru menyampaikan bahwa untuk kasus di Demak perlu dilakukan teknik-teknik restorasi yang tepat. Banjir rob, tambak tenggelam, dan erosi pesisir yang parah membuat upaya restorasi tidak mudah. Salah satu yang bisa dilakukan misalnya dengan membuat saluran air dan membongkar tanggul-tanggul tambak seperti yang pernah dilakukan oleh masyarakat di Tanah Keke, Takalar,





Sulawesi Selatan tujuannya agar bibit mangrove bisa masuk dan tumbuh secara alami dan mengembalikan tambak menjadi kawasan hutan mangrove.

Teknik lain yang bisa digunakan untuk restorasi tambak adalah dengan cara pengerukan yang dicairkan. Menurut Ben Brown teknik ini adalah sebuah proses dimana sedimen yang dikeruk secara hidrolik kemudian dikirimkan ke areal mangrove yang terdegradasi menggunakan pipa atau disemprot, cara ini bisa meninggikan elevasi substrat hingga vegetasi mangrove dapat tumbuh secara alami. Hanya saja teknik ini sangat mahal dan belum tentu cocok untuk kawasan pesisir Demak.

Untuk pencegahan erosi di kawasan pesisir, Ben Brown menyarankan mengadopsi apa yang dilakukan oleh Wetlands International Indonesia di Pulau Dua, Serang, Banten sebagai sebuah praktek pencegahan erosi yang ramah lingkungan dan murah. Untuk melindungi Cagar Alam Pulau Dua, WII membuat perangkap sedimen dari jaring bekas dan tumpukan karung berisi pasir, hasilnya dari tahun 2012 sampai saat ini Cagar Alam Pulau Dua terlindungi oleh sabuk hijau baru dari hasil sedimen yang terperangkap yang ditumbuhi mangrove jenis *Avicennia*.

Ben Brown menambahkan teknik *Hybrid Engineering* yang sudah dibangun di Desa Bedono dan Timbulsloko oleh program BWN juga menjadi salah satu alternatif pencegahan erosi yang bisa direplikasi di desa-desa lain di pesisir Demak. Selain ramah lingkungan, pembuatan HE dan perawatannya bisa dilakukan oleh masyarakat.

Uji Coba Masyarakat

Kunci keberhasilan upaya restorasi adalah keterlibatan masyarakat. Untuk itu, dalam lokakarya selama dua hari, masyarakat diberi kesempatan untuk merumuskan dan memutuskan upaya restorasi apa yang bisa dilakukan dan yang sesuai dengan kondisi desanya masing-masing. Harapannya, dari para peserta muncul ide berbagai macam teknik restorasi untuk dipraktekkan dalam kegiatan program BWN.

Salah satu peserta dari Desa Wedung, Muhajir, dalam sesi presentasi kelompok menyampaikan bahwa praktek restorasi sebenarnya sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat di Desa Wedung, salah satu tekniknya dengan membuat 'wangkongan' atau alat jebakan udang dengan menggunakan jaring sepanjang seratus meter. Selain sebagai perangkap udang, alat yang dipasang di pinggir laut ini juga berfungsi untuk memerangkap sedimen. Teknik lain yang dibuat masyarakat yaitu dengan menggunakan ban mobil bekas ditumpuk setinggi dua meter kemudian dipasang di sepanjang tepian tambak dengan jarak 5 meter antar satu tumpukan dengan tumpukan lainnya. Selain melindungi tambak dari ombak, ban-ban tersebut juga berfungsi sebagai struktur pemerangkap sedimen.

Pengalaman lain disampaikan oleh Fatkhul Huda dari Desa Betahwalang, dimana untuk mencegah erosi sepanjang sungai, masyarakat mempraktekkan teknik penanaman dengan jenis tanaman lokal bernama 'Balusan', yaitu sejenis rumput yang berfungsi untuk memperkuat tanggul tambak dari hempasan ombak yang diakibatkan oleh ratusan kapal-kapal nelayan yang hilir mudik sepanjang hari. Menurut Fatkhul Huda, sebelum ditanami rumput tersebut, erosi terjadi sangat parah. Pohon mangrove yang pernah ditanam pun bertumbangan, tidak mampu menahan hempasan ombak dari kapal-kapal nelayan tersebut.

Hasil diskusi kelompok dari delapan desa merumuskan usulan teknik restorasi yang bisa diterapkan di desa masing-masing, antara lain dengan teknik *Hybrid Engineering*, perbaikan hidrologi air, pengurukan lumpur cair, perangkap sedimen dengan jaring, membuat sodetan sungai baru untuk mengalirkan sedimen, dan pembongkaran tanggul tambak.

.....bersambung ke hal 17

Rilis Pers

Lokakarya Penyusunan Grand Design Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta 2017-2030

JAKARTA, 8 Agustus 2017 – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh KARINA (Caritas Indonesia) melalui Program *Partners for Resilience - Strategic Partnership* (PfR-SP) dan juga platform multi pihak *Marunda Urban Resilience in Action* (MURIA) menyelenggarakan lokakarya penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta 2017-2030 di tanggal 9-10 Agustus 2017 bertempat di Ruang Serba Guna Lantai 2 - Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) Provinsi DKI Jakarta. Upaya penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan ini menjadi suatu keniscayaan agar para pemangku kepentingan pertanian perkotaan DKI Jakarta mempunyai kesamaan visi, misi, target, dan dapat bersinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pertanian perkotaan untuk mendukung program penyediaan ruang terbuka hijau dan ketahanan pangan Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan Kota Berketahanan Jakarta. Desain Besar ini, sekaligus juga menjadi masukan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2018-2022.

Proses penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta yang sudah dimulai secara kolaboratif sejak April 2017 ini menunjukkan kemajuan yang bagus dan perlu untuk dikonsultasikan kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas, sehingga lokakarya penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta ini menjadi langkah yang penting dilakukan dalam usaha penyelesaian dokumen tersebut. Dengan mendasarkan penyusunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2030, maka Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta ini dipastikan akan menjamin keberlanjutan hasil-hasil positif pembangunan dalam sektor pertanian perkotaan DKI Jakarta ke depan.

"Kompleksitas permasalahan perkotaan di Provinsi DKI Jakarta terkait dengan ketahanan pangan yang ditambah dengan semakin berkurangnya lahan pertanian serta meningkatnya kejadian bencana yang diakibatkan oleh perubahan iklim saat ini sudah mengharuskan kami untuk mempertimbangkan upaya pengelolaan risiko secara terpadu dalam mengarahkan perencanaan pembangunan ke depan untuk menjadikan Provinsi DKI Jakarta tidak hanya menjadi kota yang maju tetapi



Dr. Ir. Oswar M. Mungkasa, MURP, Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, membuka lokakarya penyusunan desain besar pertanian kota DKI Jakarta. (Foto: Yohanes Baskoro-Yayasan KARINA)



Diskusi Kelompok Terarah guna membahas isu-isu strategis pertanian kota DKI Jakarta. (Foto: Yohanes Baskoro-Yayasan KARINA)



Taufik Yulianto, Kepala Sie Pertanian Kota, Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, menyampaikan hasil diskusi isu strategis pertanian kota DKI Jakarta. (Foto: Yohanes Baskoro-Yayasan KARINA)

juga memiliki ketahanan pangan dan penghidupan dari sektor pertanian kota yang berkelanjutan, sehingga menjadi tangguh dalam mengantisipasi ancaman bencana yang mungkin muncul", Dr.Ir. Oswar Mungkasa, MURP, Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup (TRLH) menegaskan.

Menambahkan apa yang sudah ditegaskan oleh Deputi Gubernur TRLH Provinsi DKI Jakarta tersebut, Adrianus Suyadi, SJ, Direktur Eksekutif Yayasan KARINA (Caritas Indonesia) anggota dari *Partners for Resilience* (PfR) Indonesia, juga menyampaikan, "Pengelolaan Risiko Terpadu yang menggabungkan pendekatan Pengurangan Risiko Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Manajemen serta Restorasi Ekosistem adalah solusi yang bisa ditawarkan untuk menyasar permasalahan perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Beberapa manfaat yang sudah didapatkan masyarakat dan pihak-pihak lain dalam program penguatan ketangguhan kota melalui Platform Multi Pihak MURIA adalah bukti nyata dari upaya Pengelolaan Risiko Terpadu yang bisa direplikasi di daerah lain di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini seyogyanya bisa diakomodir di dalam Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta ini."

Terkait dengan penyusunan Desain Besar Pertanian Perkotaan Provinsi DKI Jakarta tersebut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian (DKPKP), Ir. Darjamuni, MM menegaskan, "Sebagai SKPD Teknis, DKPKP berkomitmen untuk memandu pelaksanaan pertanian perkotaan berbasis ruang dan ramah lingkungan untuk keamanan dan ketahanan pangan keluarga yang ke depan akan masuk dalam Desain Besar Pertanian Perkotaan DKI Jakarta ini, guna menjamin pertanian kota berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta dan munculnya sistem pasar komoditas pangan yang terkendali antara DKI Jakarta dengan wilayah sekelilingnya yang menjamin kolaborasi multi-pihak dalam pertanian kota DKI Jakarta dengan semua pemangku kepentingan yang ada."

Tentang *Partners for Resilience-Strategic Partnership* (PfR-SP) Indonesia

PfR-SP Indonesia adalah sebuah aliansi dari lima organisasi kemanusiaan, pembangunan, dan lingkungan, mnelibatkan – CARE International Indonesia, Palang Merah Indonesia (anggota dari Federasi Internasional Perkumpulan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah), *Wetlands International Indonesia,* KARINA, dan *The Red Cross Climate Centre* (RCCC) – yang saling bekerja sama untuk memperkuat ketangguhan masyarakat melalui proses dialog kebijakan, regulasi, dan rencana pembangunan. PfR Indonesia dipimpin oleh CARE International Indonesia.

PfR Indonesia adalah bagian dari aliansi global gabungan beberapa organisasi yang bekerja di sepuluh negara di Asia, Afrika dan Amerika Tengah. Program ini memfasilitasi dialog Pengelolaan Risiko Terpadu dalam Kebijakan, Regulasi, dan Rencana Pembangunan di negara-negara tersebut. Program *Partners for Resilience* didukung pendanaannya dari Kementerian Luar Negeri Belanda. ••

Peduli Ekosistem Mangrove

Bersih-bersih Sampah di Segara Anakan Cilacap

*Elisabet R.R.B. Hutabarat**

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citanduy merupakan salah satu sungai besar yang bermuara di Segara Anakan Cilacap (SAC). Ketika musim penghujan SAC mengalami banjir akibat terbawanya material-material organik dan anorganik dari bagian hulu dan tengah DAS Citanduy, baik dalam bentuk sampah dan lumpur. SAC yang merupakan sisa hutan mangrove terluas di Pulau Jawa kini semakin mengalami pendangkalan akibat sedimentasi tersebut. SAC merupakan area penting juga bagi hewan di perairan yaitu ikan, kepiting, udang, dan juga komunitas burung air yang memanfaatkannya sepanjang siklus hidupnya untuk mencari makan, migrasi, pemijahan, dan lainnya. Sebagai akibat dari kurangnya informasi dan koordinasi kepada masyarakat bagian hulu-hilir, maka Gerakan Citanduy Lestari (GCL) melakukan sebuah aksi nyata yaitu aksi bersih sampah/pemungutan sampah di Segara Anakan Cilacap. Kegiatan ini mengundang komunitas pemerhati lingkungan dari Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Provinsi Jawa Barat. Aksi bersih sampah di Segara Anakan Cilacap terlaksana pada hari minggu, 13 Agustus 2017 di Desa Klaces, Kampung Laut, Cilacap. Kegiatan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan pemerintah kecamatan Kampung Laut sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka merayakan HUT RI ke 72 di tingkat kecamatan. Aksi pemungutan sampah ini diikuti oleh Gerakan Anti Sampah Cilacap (GASC), Explore Cilacap, Mengkaji Pustaka, karang taruna Desa Klaces dan Desa Ujung Alang, Pramuka SMA Kampung Laut, Kompleet Purwokerto, Green Corps FIB UNSOED, Bio-Explorer FABIO UNSOED, Gamapala-Ciamis, Ciamis Clean Action, Wikupala Purwokerto, dll. Acara aksi bersih sampah ini mengajak juga wilayah hulu seperti Ciamis untuk melihat realita di daerah hilir agar turut menjaga stabilnya laju sampah di hulu. Tidak hanya beraksi, informasi yang jelas mengenai pengelolaan sampah di DAS Citanduy dan Segara Anakan Cilacap sangat penting diketahui, maka GCL mengundang narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap dalam bentuk *talkshow*.

.....bersambung ke hal 18



Foto Bersama dengan Peserta Aksi Bersih-Bersih Segara Anakan dan juga Bapak Camat Kampung Laut

Penilaian Efektifitas Pengelolaan Taman Nasional menggunakan Perangkat METT

*Yus Rusila Noor**

METT (*Management Effectiveness Tracking Tool*) adalah suatu perangkat yang digunakan untuk melakukan pengkajian tingkat efektifitas pengelolaan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pengelolaan yang telah ditentukan sebelumnya. Perangkat ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2002 yang kemudian digunakan sebagai kerangka kerja IUCN WCPA utuk mengukur efektifitas pengelolaan. Pada tahun 2015, negara-negara anggota Konvensi Ramsar, dalam pertemuan CoP 12 telah mengadopsi revisi METT yang disesuaikan untuk lahan basah dan Situs Ramsar. Hingga tahun 2016, setidaknya seperlima kawasan perlindungan terrestrial di dunia telah menggunakan perangkat ini.

METT juga telah diaplikasikan di Indonesia untuk menilai efektifitas pengelolaan pada tingkatan situs atau lapangan, dengan melibatkan staf di kawasan yang memiliki pengetahuan langsung terkait dengan pengelolaan di suatu kawasan. SK Dirjen KSDAE nomor SK.357/KSDAE-SET/2015 tentang Penetapan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru menetapkan nilai awal efektifitas pengelolaan kawasan. SK tersebut juga menguraikan *outline* laporan penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi.



Sejalan dengan fungsi perangkat tersebut, UPT Taman Nasional Berbak – Sembilang melaksanakan kegiatan penilaian METT di Jambi, 28 – 29 Agustus 2017. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala UPT Taman Nasional Berbak – Sembilang, Ir. Pratono Puroso, MSc. dan difasilitasi oleh *National Project Manager Sumatran Tiger Project.* Untuk memperoleh masukan yang lebih komprehensif, peserta yang terlibat dalam penilaian tersebut berasal dari lingkup internal Kementerian LHK, pemerintah daerah, Universitas Jambi dan LSM yang pernah atau sedang melakukan kegiatan di Taman Nasional, seperti ZSL, Gita Buana dan Wetlands International Indonesia.

Pertemuan berjalan sangat produktif, tidak kurang dari 30 pertanyaan dari peserta yang terbagi lagi menjadi pertanyaan cabang, berkisar pada hal yang terkait dengan informasi umum, ancaman, dan efektifitas pengelolaan. Penilaian yang diberikan terhadap seluruh pertanyaan menjadi acuan penting untuk melihat sejauh mana kelebihan dan kekurangan dalam proses pengelolaan kawasan, terutama bagaimana menindaklanjuti ha-hal yang teridentifikasi dalam penilaian tersebut.

Wetlands International Indonesia sangat senang dapat terlibat kembali dalam penilaian tersebut, karena kami telah bekerjasama di wilayah ini sejak awal tahun 1980an, dan kemudian memfasilitasi penetapan Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Sembilang, hingga keterlibatan dalam kerja sama internasional, seperti menjadi situs Ramsar dan *East Asian – Australasian Flyway Partnership.*▪▪

**Head of Programme*

..... sambungan dari halaman 3

Batu Lima, Kawasan Wisata Terbengkalai, di Kabupaten Tanah Laut .....

Daya tarik lainnya yang mungkin tidak biasa adalah lima buah batu yang luasnya ± 4 m2 masing-masing, menyembul sekitar 1-2 m di atas permukaan laut (bergantung pada pasang surut air laut), dan berada pada jarak sekitar 400 m dari bibir pantai. Berdasarkan jumlah batu sebanyak lima buah inilah kawasan pantai itu dinamai Batu Lima. Legenda yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa batu ini tempat mandi lima putri kayangan yang dalam adat disebut mandi badudus.

Sangat disayangkan dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, mulai tahun 2010-an Batu Lima menjadi kawasan wisata pantai terbengkalai dan berubah total seperti kawasan mati. Orang tidak lagi tertarik dan kemudian berduyun-duyun mengunjungi kawasan ini. Kehidupan di kawasan terlihat hanya dari lalu-lalang orang (terutama warga setempat) berkendaraan di jalan beraspal selebar 8-10 m yang menghubungkan desa-desa di wilayah Kecamatan Takisung dan desa-desa di wilayah Kecamatan Panyipatan. Kehidupan lain yang terlihat adalah aktifitas warga setempat menggembalakan sapi ternak di lapangan berumput tepi pantai atau mengeringkan udang-udang kecil bahan baku terasi (Gambar 2). Karena kawasannya mati, prasarana yang telah dibangun pemerintah daerah pun mubazir; termasuk dalam hal ini adalah 18 pesanggrahan atau *cottage* (Gambar 3), pondok naungan (*shelter*), dan tempat bermain anak (*playground*) yang beberapa bagiannya sudah rusak.

Terdapat masalah di Batu Lima yang dapat dikategorikan berat dan diperkirakan sangat sulit untuk ditanggulangi, yaitu endapan lumpur dan sampah yang terbawa arus air laut dan kemudian berangsur-angsur menumpuk dan menutupi hamparan pasir pantai Batu Lima (Gambar 4). Lumpur tersebut adalah sedimen yang diduga akibat dari kegiatan manusia (terutama penambangan batu bara dan pengalihfungsian lahan berhutan menjadi lahan terbuka untuk pertanian) di daratan.



Gambar 2. Penggembalaan ternak dan pengeringan udang kecil bahan baku terasi



Gambar 3. Sebagian pesanggrahan yang terbengkalai

Sedimen diangkut oleh aliran air anak-anak sungai yang bermuara di Sungai Barito, sungai utama yang akhirnya bermuara di Laut Jawa.

Masalah sedimentasi bukan hal baru di Sungai Barito. Sedimentasi yang membuat ruas tertentu sungai yang digolongkan terlebar di Indonesia itu menjadi dangkal. Hal ini pernah dilaporkan oleh Soendjoto (2013).



Gambar 4. Lumpur dan sampah menutupi hamparan pasir pantai di Batu Lima

Seperti halnya sedimen, sampah pun terbawa aliran sungai. Sebagian besar dari sampah yang terbawa tersebut adalah sampah organik, ada juga sampah non-organik serta berasal dari rumah tangga (domestik) dan non-domestik (potongan batang, patahan dahan).

Masalah tersebut semakin parah, ketika tidak ada obyek wisata lain yang bisa dikembangkan (selain hamparan pasir pantai dan lima buah batu) untuk menarik wisatawan berkunjung ke Batu Lima. Tidak seorang pun atau tidak ada satu pun instansi pemerintah maupun lembaga swasta yang peduli dengan Batu Lima. Wajar apabila kemudian orang mencari kawasan atau mengembangkan kawasan wisata pantai baru di Kabupaten Tanah Laut.

Salah satu kawasan yang baru dikembangkan selama 3-4 tahun terakhir ini adalah Pantai Asmara (akronim dari Asam-asam Muara) yang hamparan pasirnya bersih dan air lautnya masih terlihat biru. Dalam kurun waktu mendatang, Pantai Asmara bisa jadi lebih disukai untuk dikunjungi daripada Pantai Takisung dan Pantai Batakan. Kedua kawasan pantai yang disebut terakhir ini sudah terlihat kotor (banyak sampah non-organik), air lautnya berwarna kecoklatan, serta keamanan dan kenyamanan kawasannya pun berkurang. ••

Daftar Pustaka

Soendjoto, M.A. 2013. Taman Wisata Alam Pulau Bakut bertambah luas? Warta Konservasi Lahan Basah, 21(3):3,15.

** masoendjoto@gmail.com; Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Jalan A. Yani Km 36 Banjarbaru 70714*

Fokus Lahan Basah

..... sambungan dari halaman 11

Lokakarya Pemetaan Kesempatan dan Rencana Rehabilitasi Mangrove .....

Harapan dari peserta, teknik-teknik ini bisa mengembalikan fungsi tambak-tambak yang rusak menjadi kawasan mangrove kembali dan bisa mengurangi erosi di kawasan pesisir dan sepanjang aliran sungai.

Tantangan yang dihadapi dalam melakukan kegiatan restorasi menurut para peserta diantaranya kedalaman tambak, ombak besar, perahu nelayan yang tidak ramah lingkungan seperti perahu sodo dan garuk (kedua jenis perahu ini sering merusak sedimen yang sudah ada), kepemilikan lahan terutama tanah timbul, kesadaran masyarakat yang rendah, dan belum efektifnya Peraturan Desa (Perdes).

Untuk mengatasi masalah tanah timbul dan perahu tidak ramah lingkungan, Suharto dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak mengusulkan supaya desa-desa yang sudah mempunyai Perdes tentang pengelolaan pesisir mensosialisasikan kembali Perdes kepada warganya, selain itu perlu dibentuk juga satgas yang anggotanya dari masing-masing kelompok untuk mengawal Perdes tersebut. Siska dari BKSDA Jateng menambahkan, untuk kawasan mangrove yang sudah ada di Demak, Pemda Demak mengusulkan kepada pemerintah provinsi agar menetapkannya sebagai kawasan ekosistem esensial.

Ben Brown dari Yayasan Hutan Biru mewakili konsorsium BwN dalam penutupan acara menyampaikan apreasiasi kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam rangka mencari solusi bersama atas permasalahan yang dihadapi wilayah pesisir Demak. Komitmen seluruh kelompok untuk melakukan restorasi di desa masing-masing merupakan perjuangan yang tidak mudah, perlu kerja keras, kerja cerdas, dan dukungan semua elemen yang mencintai lingkungan.••

**Community Development Officer Wetlands International Indonesia*

..... sambungan dari halaman 14

Peduli Ekosistem Mangrove, Bersih-bersih Sampah di Segara Anakan .....

Menurut Ibu Anti perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, di Kampung Laut belum ada rencana pembuatan TPS dan ada kesulitan pembawaan sampah menuju tempat pengelolaan akhir (TPA) akibat perbedaan geografis dan transportasi. Masyarakat kampung laut juga belum diajarkan tentang pengolahan sampah menjadi bahan guna ulang ataupun daur ulang. Perlu juga koordinasi dengan pihak-pihak terkait DAS Citanduy. Sampah juga mengurangi nilai estetika untuk wisatawan yang ingin berwisata ke alam Segara Anakan Cilacap. Dari pengelolaan sampah, GCL juga meninformasikan bahwa Segara Anakan Cilacap memiliki potensi untuk ekowisata.

Pada *talkshow* ke-2 Elisabet sebagai narasumber yang merupakan anggota GCL menyampaikan tentang potensi ekowisata di SAC khususnya sebagai lokasi pengamatan burung. Pengamatan burung masih terdengar asing bagi beberapa komunitas yang hadir pada *talkshow* tersebut. Oleh sebab itu, kami masih mengenalkan dasarnya saja dan mengajak untuk mengikuti kegiatan bersama seperti pengamatan burung di Asian Waterbird Census setiap awal tahun di Segara Anakan.

Ekowisata dapat membantu menyelamatkan dan melestarikan lingkungan serta membantu perekonomian masyarakat lokal. GCL juga mendapatkan dukungan dari Wetlands International Indonesia berupa buku dan poster tentang mangrove dan burung air. Penyerahan buku ini kepada Bapak Camat, Kampung Laut yang nantinya dikelola masuk ke sekolah-sekolah untuk pendidikan lingkungan. Diharapkan melalui penyadartahuan dan aksi bersih sampah tersebut dapat menggerakan masyarakat setempat, komunitas dan kaum muda untuk peduli dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat dikelola dengan baik sebagai penyeimbang ekologi dan ekonomi masyarakat setempat.

** alumni UKM Himpunan Mahasiswa Bio-Explorer Fakultas Biologi, UNSOED, Purwokerto*

(Gerakan Citanduy Lestari,Cilacap) email: citanduy.lestari@gmail.com, lisbetz.rose@gmail.com



Foto Simbolis Penyerahan Buku dan Poster kepada Bapak Camat



Foto Pemungutan Sampah/Bersih Sampah



Kehadiran Peserta dari Sleko-Kampung Laut



Talkshow Pengelolaan Sampah di DAS Citanduy dan Sagara Anakan Cilacap

Anonim. 2016. Peatland Brief: Can Peatland Landscapes in Indonesia be Drained Sustainability? An Assessment of the eko-hidro' water Management Approach. TROPENBOS International/ Wetlands International.

Anonim. 2017. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: P32/ MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

ICRAF. 2017. Agroforestry on Peatlands: Combining Productive and Protective as part of Restoration. ICRAF.

ICRAF. 2017. Policy Brief: Agroforestry for Sustainable Mountain management in Southeast Asia. ICRAF.

Noordwijk, M.V. 2017. Bunga Rampai dari Kebun Lindung Anthology of Blogs and Grams in the 25 th Year of ICRAF SE Asia. World Agroforestry Center.

Rakhmani, I., A. Pellini and Y. Nurhidayat. 2017. Better Policies Better Lives. Linking Values and Research Evidence for Policy Advocacy. The Journey of the Indo Kementrian PPN/BAPPENAS.

Berang-berang (*Otter*)

Berang-berang adalah jenis mamalia yang hidup di habitat lahan basah, seperti sungai dataran rendah dan tinggi, danau, persawahan, habitat air tawar, payau dan air laut (pesisir pantai). Berbeda dengan anggapan orang banyak, bahwa makanan utamanya adalah ikan, kenyataan nya mereka juga suka memangsa katak, udang, serangga, ular, kepiting atau keong, bahkan jenis berang-berang tertentu memangsa mamalia kecil atau burung.

Berang-berang masuk ke dalam famili Mustelidae, subfamili Lutrinae. Terdapat 13 jenis berang-berang di seluruh dunia (kecuali Australia), 4 jenis diantaranya terdapat di Indonesia, yaitu *Aonyx cinereus* (Berang-berang cakar-kecil), *Lutra lutra* (Berang-berang utara), *Lutra sumatrana* (Berang-berang hidung-berbulu) dan *Lutrogale perspicillata* (Berang-berang bulu-licin). Dua diantaranya yaitu *L. lutra* dan *L. sumatrana* telah dilindungi berdasarkan PP no 7 tahun 1999. Tidak seperti kedua belas jenis lainnya yang menghabiskan waktunya di daratan, kecuali untuk berburu dan mencari mangsa di dalam air (semi-akuatik), Berang-berang laut (*Enhydra lutris*) justru hampir menghabiskan sebagian besar hidupnya di laut (akuatik), akan tetapi jenis ini tidak diketemukan di Indonesia.

Berang-berang memiliki cakar berselaput dan ekor panjang berotot (kecuali berang-berang laut). Rambut terdiri dari dua lapisan, lapisan luar berbentuk panjang, relatif keras dan kaku, serta lapisan dalam dengan rambut yang halus dan lunak. Lapisan rambut dalam inilah yang berfungsi memerangkap udara sehingga tidak tembus air dan menjaga kulit tetap kering dan hangat.

Sangat disayangkan jenis binatang yang berada di puncak piramida makanan (karnivora puncak) di habitat lahan basah ini, kurang mendapat perhatian dari para peneliti atau pengambil kebijakan, padahal berang-berang merupakan salah satu jenis binatang yang dapat dijadikan indikator kualitas suatu lingkungan perairan. Masih banyak lagi fungsi ekologisnya yang butuh penelitian lebih lanjut, misal keterkaitannya dalam mengontrol hama keong mas atau tikus di persawahan, dan sebagainya. Bagi masyarakat pembudidaya perikanan, berang-berang dianggap hama, dan tak jarang jenis ini banyak diburu dan dibunuh.

Saat ini sedang marak tren memelihara berang berang sebagai hewan piaraan dirumah. Hal ini adalah kegiatan yang mengancam



keberadaan populasi berang-berang di alam karena sebagian besar suplai diambil dari alam, terutama bayi karena dianggap cukup jinak dan lucu. Hasil pengamatan menunjukkan berang-berang ini mati beberapa bulan setelah dipelihara karena kesalahan penanganan dan kerentanan dari berang-berang muda ini.

Untuk itu, suatu aksi konservasi perlindungan jenis perlu terus dilaksanakan, antara lan: i) penyediaan data dan informasi, ii) penyuluhan intensif mengenai peran berang-berang dalam rantai ekosistem, iii) pengembangan metode pengusiran berang-berang tanpa harus diburu dan dibunuh, iv) kampanye berang-berang adalah satwa liar bukan satwa piaraan. ••

WETLANDS INTERNATIONAL

GLOBAL OFFICE
PO Box 471
6700 AL Wageningen
The Netherlands
post@wetlands.org
www.wetlands.org

INDONESIA
Jl. Bango No. 11
Bogor 16161
admin@wetlands.or.id
http://indonesia.wetlands.org

ISSN:
0854-963X

Foto Cover:
Bibit mangrove yang tumbuh alami di sedimen yang terperangkap struktur *hybrid engineering*
(Foto: Apri Susanto Astra)

Warta Konservasi Lahan Basah (WKLB) adalah majalah yang diterbitkan oleh Wetlands International Indonesia secara berkala setiap tiga bulan sekali (triwulan), dalam rangka mendukung pengelolaan dan pelestarian sumberdaya lahan basah di Indonesia. WKLB diterbitkan untuk mewadahi informasi-informasi seputar perlahanbasahan di Indonesia yang disampaikan oleh berbagai kalangan baik secara individu maupun kolektif. Diharapkan media WKLB ini dapat turut berperan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepedulian seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan dan mengelola lahan basah secara bijak dan berkesinambungan.

Wetlands International @WetlandsInt Wetlands International

Ditjen. KSDAE,
Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Wetlands INTERNATIONAL

Pencetakan warta ini didanai oleh program Partners for Resilience Strategic Partnership (PfRSP)

PARTNERS FOR RESILIENCE

Jumlah kejadian bencana alam dan bencana akibat kelalaian manusia telah meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini. Selain itu, perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan juga semakin meningkatkan risiko bencana terutama bagi kalangan miskin yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Oleh karenanya, sebuah pendekatan pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi sangatlah diperlukan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim yang semakin meningkat.

Di Belanda, Partners for Resilience Strategic Partnership (PfRSP) merupakan sebuah aliansi yang terdiri lima organisasi yakni CARE Netherland, Cordaid, the Netherlands Red Cross, the Red Cross Red Crescent Climate Centre dan Wetlands International yang bersama-sama mengembangkan program kemitraan strategis, untuk mendorong penerapan pengelolaan resiko yang terintegrasi / Integrated Risk Management (IRM) mulai dari tingkat global hingga di tingkat lokal. IRM merupakan sebuah pendekatan pengelolaan risiko bencana yang mengabungkan 3 pendekatan yakni pengurangan resiko bencana (DRR), adaptasi perubahan iklim (CCA) dan restorasi dan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan (ERM). Ketiga pendekatan ini digunakan untuk mendorong penerapan IRM dalam domain kebijakan, praktek dan investasi.

Di Indonesia, PfRSP beranggotakan 5 organisasi yang masing-masing merupakan perwakilan dari organisasi yang beraliansi di tingkat global. Kelima organisasi tersebut antara lain CARE International Indonesia, the Indonesian Red Cross (Palang Merah Indonesia), Wetlands International Indonesia, Karina KWI Yogyakarta dan the Red Cross Climate Centre. Kelima organisasi ini berkolaborasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat Indonesia dengan mendorong implementasi IRM, yang dielaborasikan kedalam 5 lintasan kerja. Masing-masing lintasan kerja dipimpin oleh satu organisasi.

Wetlands International Indonesia (WII) menjadi salah satu anggota aliansi PfRSP Indonesia yang memimpin kegiatan lobby dan advokasi IRM di lintasan kerja/*trajectory* 4. Lintasan ini bertujuan untuk mendorong penerapan IRM didalam rencana investasi pembangunan *lowlands ecosystem* yang bijaksana dan berkelanjutan (khususnya kawasan ekosistem mangrove dan gambut).